

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory (teori keagenan) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam hubungan ini *principal* mendelegasikan wewenangnya kepada *agent*, sedangkan *agent* merupakan pihak yang melaksanakan wewenang tersebut. Ada tiga macam hubungan keagenan. Antara manajer dengan pemegang saham (*shareholders*), antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*), dan antara manajer dengan pemerintah.

Teori keagenan mengacu kepada pemenuhan tujuan utama perusahaan yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang dilakukan oleh *agent*. Ketika manajemen tidak mampu atau enggan untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham maka akan menimbulkan konflik keagenan (Ahmad dan Septiani, 2008). Konflik keagenan (*agency conflict*) adalah konflik yang disebabkan oleh pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

Aryanti dan Kusumaningrum (2006) mengungkapkan timbulnya asimetri informasi merupakan dampak dari teori keagenan. Pihak manajemen memiliki lebih banyak informasi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (*principal*), sehingga terjadi ketidakseimbangan

informasi perusahaan. Keadaan inilah yang kemudian digunakan oleh manajemen sebagai sarana untuk melakukan tindakan sesuai keinginan dan kepentingannya sendiri.

Untuk mengatasi konflik keagenan yang timbul tersebut, baik *principal* maupun *agent* harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan ada tiga biaya keagenan antara lain *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* adalah biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Sedangkan *residual loss* adalah pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan *principal*.

Eisenhardt (1989) dalam Priantinah (2008) mengemukakan bahwa terdapat tiga asumsi sifat manusia yang digunakan dalam *agency theory*, yaitu manusia umumnya lebih mementingkan diri sendiri (*self interest*), daya pikir manusia akan persepsi masa depan terbatas (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

2.1.2 Stakeholder Theory

Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* bukan hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri. Stakeholder tersebut tidak hanya para pemegang saham tetapi

mencakup pihak-pihak yang lebih luas. Karyawan, pemasok, konsumen, kreditur, dan masyarakat yang berada di sekitar tempat perusahaan beroperasi termasuk ke dalam *stakeholder* (Solomon, 2007).

Stakeholder theory pada dasarnya mengandung hubungan timbal balik antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. *Stakeholder* dapat mengendalikan pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan melalui kontribusinya sedangkan perusahaan dituntut untuk mampu memuaskan kepentingan *stakeholder* tersebut. Sehingga, perusahaan akan bereaksi dengan berbagai strategi untuk dapat mengelola *stakeholdernya* sesuai dengan kebijakan perusahaan.

2.1.3 *Transaction Cost Theory*

Transaction cost theory merupakan bagian dari *corporate governance* dan teori keagenan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa biaya akan meningkat ketika mempekerjakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Seperti yang terjadi ketika *principal* mempercayakan pengelolaan sumber dayanya kepada *agent*.

Transaction cost theory mengasumsikan bahwa para manajer adalah oportunis. Manajer dianggap lebih mementingkan kepentingan sendiri dalam menjalankan transaksi-transaksi perusahaan. Tindakan ini berdampak buruk bagi keuangan perusahaan karena investor potensial cenderung tidak tertarik untuk berinvestasi (Anton, 2012).

2.1.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate governance erat kaitannya dengan *agency theory*. Pemisahan dalam *agency theory* memicu timbulnya *agency conflict*. Oleh karena itu, perlu diterapkan mekanisme *corporate governance* untuk meminimalisir konflik yang ada.

Terdapat beberapa definisi mengenai *corporate governance* yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang menjelaskan hubungan antara investor, kreditur, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
- b) Menurut Bank ICBC, *corporate governance* merupakan barometer sistem dan juga struktur yang digunakan untuk menanamkan kepercayaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada intinya, perusahaan menunjukkan bahwa ada sistem yang mengelola dan mengawasi dengan baik untuk melindungi kepentingan stakeholders sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- c) Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan *good corporate governance* merupakan kesadaran setiap individu untuk menjalankan praktek bisnisnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang mementingkan kepentingan stakeholders, kelangsungan usaha, dan menghindari tindakan oportunistis.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis. Prinsip-prinsip *corporate governance* diperlukan untuk mencapai *sustainability* perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun prinsip-prinsip dari *corporate governance* meliputi:

- a) **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan juga keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Transparansi mengandung unsur *disclosure* dan penyediaan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Para manajer perusahaan harus berperilaku transparan kepada stakeholder, yaitu jujur dalam menyajikan laporan keuangan dan tidak melakukan manipulasi yang oportunistis.
- b) **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Manajer harus menyusun job description mengenai fungsi dari setiap bagian. Sehingga, hak dan tanggung jawab serta fungsi dari setiap bagian dalam perusahaan menjadi jelas.
- c) **Responsibilitas**, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perusahaan serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Responsibilitas diperlukan perusahaan untuk menjamin terpeliharanya sustainability perusahaan dalam jangka panjang.

- d) Independensi, yaitu pengelolaan perusahaan secara mandiri, tanpa adanya tekanan dari pihak lain dan objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- e) Kewajaran dan kesetaraan, yaitu perlakuan yang adil (fairness) dalam memenuhi hak dan kewajiban perusahaan terhadap stakeholders yang timbul dari perjanjian yang dibuat dan peraturan perundang-undangan. Setiap stakeholder harus mendapatkan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dengan prinsip tersebut diharapkan perusahaan mampu menaati semua peraturan yang ada sehingga melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan pada kelangsungan bisnis perusahaan.

Penerapan *corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien dan transparan. Melalui mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan dan memberikan perlindungan terhadap stakeholder.

2.1.4.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Midiastuty dan Mahcfoedz, 2003). Kepemilikan manajemen atas saham

perusahaan dipandang mampu mengatasi *agency conflict* yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Dengan demikian, permasalahan keagenan yang ada dapat terminimalisir jika manajer berperan serta sebagai pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Shleifer dan Vishny (1997) dalam Jao dan Pagalung (2011) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar secara ekonomis memiliki fungsi untuk memonitor. Sehingga, apabila kepemilikan manajerial rendah, maka kemungkinan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik akan meningkat.

2.1.4.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. institusi dalam hal ini dapat berasal dari LSM, pemerintah, maupun perusahaan publik atau swasta.

Investor institusional adalah investor yang canggih (*sophisticated*). Investor institusional memiliki kemampuan pengawasan secara lebih efektif dibandingkan dengan investor non institusional dan tidak terpengaruh dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajer (Bushee, 1998 dalam Jao dan Pagalung, 2011). Dengan demikian, investor institusional dapat memonitor pihak manajemen sehingga dapat mencegah dan mengurangi motivasi manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba.

2.1.4.3 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah orang yang mendapatkan tugas untuk memastikan strategi perusahaan dilaksanakan dengan baik, memonitoring manajemen dalam mengelola perusahaan, dan memastikan perusahaan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Di dalam penjabaran Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG, dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan semua kegiatan bank serta memberikan nasihat kepada direksi.

Secara umum, dewan komisaris diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kualitas informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan. Pengawasan dilakukan agar motivasi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba berkurang sehingga pihak investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

2.1.4.4 Komite Audit

Komite audit merupakan pihak yang membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas auditor internal maupun eksternal (Pamudji dan Trihartati, 2010). Komite audit bertugas untuk mengawasi manajemen dan pihak auditor independen. Dengan adanya komite audit, prinsip-prinsip *corporate governance* harus dipastikan dapat terlaksana dengan baik meskipun terjadi konflik kepentingan dalam perusahaan.

Setiap perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk memiliki komite audit sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep29/PM/2004. Jumlah anggota komite audit disesuaikan dengan kompleksitas setiap perusahaan dan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

2.1.5 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif erat kaitannya dengan *agency theory*. Sekitar tahun 1960 teori akuntansi positif mulai berkembang. Belkaoui (2007) menjelaskan dorongan utama dari pendekatan positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan manajemen mengenai standar dengan menganalisis biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu. Teori akuntansi positif didasarkan pada proporsi bahwa manajer, stakeholder, dan politisi rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka, yang secara langsung berkaitan dengan kompensasi mereka atau kekayaan mereka. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh mereka berdasarkan pada metode akuntansi yang dapat memaksimalkan kegunaan mereka.

Watt dan Zimmerman (1986) dalam Januarti (2004) merumuskan hipotesis dalam teori akuntansi positif sebagai berikut:

a) Hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*)

Hipotesis rencana bonus diartikan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih memilih menggunakan metode akuntansi yang dapat

meningkatkan pelaporan laba pada periode berjalan. Pilihan tersebut dapat meningkatkan nilai dari bonus yang didapatkan.

b) Hipotesis perjanjian hutang (*debt convenat hypothesis*)

Hipotesis ini memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio utang/ekuitas yang tinggi maka manajer perusahaan akan lebih memilih menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan. Semakin tinggi rasio utang/equity, semakin dekat perusahaan dengan kendala dalam perjanjian hutang. Kendala dalam perjanjian hutang yang tinggi akan mengakibatkan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian dan biaya teknis yang timbul.

c) Hipotesis biaya proses politik (*politic process hypothesis*)

Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar daripada perusahaan kecil lebih cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan. Ukuran perusahaan adalah variabel *proxy* dalam politik.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala dari besar kecilnya suatu perusahaan. Umumnya ukuran perusahaan digolongkan ke dalam tiga tipe, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaan dan mengelola labanya secara efisien. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki pengguna laporan keuangan yang lebih banyak

dibandingkan perusahaan lainnya. Sehingga, perusahaan besar dituntut untuk menyajikan laporan keuangannya secara akurat. Maka dari itu, ukuran perusahaan merupakan cerminan perhatian politik yang mengarahkan perusahaan ke dalam *political cost*.

2.1.7 Kompensasi Bonus

Bonus scheme merupakan salah satu motivasi pemilihan metode akuntansi yang erat kaitannya dengan *positive accounting theory*. *Bonus plan hypothesis* di dalam *positive accounting theory* mengatakan bahwa manajer lebih memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba pada periode berjalan. Dengan demikian, diharapkan bonus yang mereka terima dapat meningkat. Pada umumnya, manajer pada perusahaan yang memiliki skema bonus akan melakukan tindakan memaksimalkan laba tersebut. Smith dan Watts (1983) dalam Healy (1985) menyebutkan *bonus scheme* adalah salah satu bentuk kompensasi. Definisi dari kompensasi yaitu jumlah total yang dibayarkan baik berupa kas maupun non-kas sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Di dalam kontrak bonus terdapat istilah *bogey* dan *cap*. *Bogey* adalah tingkat laba minimum untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, *cap* adalah tingkat laba maksimum untuk memperoleh bonus.

2.1.8 Manajemen Laba

2.1.8.1 Pengertian Manajemen Laba

Laba merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Laba juga digunakan stakeholder untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Hal ini dikarenakan informasi laba memiliki nilai prediktif, seperti dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) nomor 2. Agar kinerja perusahaan terlihat baik manajemen seringkali melakukan tindakan manajemen laba.

Beberapa peneliti mengartikan manajemen laba secara berbeda. Schiper (2009) mengartikan manajemen laba adalah tindakan intervensi yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pihak tertentu. Gumanti (2000) menjelaskan manajemen laba tidak selalu berkaitan dengan upaya memanipulasi informasi akuntansi. Akan tetapi, manajemen laba berhubungan dengan pemilihan metode akuntansi dalam mengatur keuntungan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Healy dan Wahlen, 1999 dalam Martin, Campbell *et al.* (2013) mengartikan manajemen laba sebagai penggunaan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan penataan transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholder tentang kinerja keuangan perusahaan ataupun untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada pelaporan akuntansi.

Berbagai definisi di atas menunjukkan bahwa tindakan manajemen laba merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh manajer perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan. Tindakan tersebut dianggap lumrah dan dilakukan dalam perspektif opportunistik. Selain itu, manajer perusahaan mempunyai kebebasan untuk menggunakan berbagai alternatif metode yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (*GAAP*) untuk melakukan tindakan manajemen laba.

2.1.8.2 Bentuk Manajemen Laba

Pemilihan metode akuntansi yang berbeda akan menghasilkan laba yang berbeda dalam pelaporan keuangan. Scott (2006) menyebutkan empat pola manajemen laba antara lain:

a) Taking a bath

Taking a bath terjadi saat perusahaan berada dalam tekanan pada periode tertentu atau terjadi pergantian direksi. Pengimplikasian metode ini adalah biaya-biaya yang ada di periode mendatang diakui pada periode berjalan. Hal ini dilakukan karena perusahaan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Akibatnya, laba periode mendatang menjadi lebih tinggi.

b) Income minimization

Pola ini dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak atau karena adanya motif politik. Perusahaan menerapkan pola ini ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi agar tidak mendapat perhatian politis. Tindakan yang dilakukan antara lain penghapusan (*write off*)

barang-barang modal dan aktiva tidak berwujud, pembebanan biaya iklan, riset, dan lain-lain.

c) *Income maximization*

Pola ini dilakukan untuk memperoleh bonus yang lebih besar atau untuk menghindari pelanggaran kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*).

d) *Income smoothing*

Pada umumnya perusahaan lebih memilih untuk menyajikan laporan keuangan dengan pertumbuhan laba yang stabil daripada terjadi perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

2.1.8.3 Motivasi Manajemen Laba

Tindakan manajemen laba didorong oleh beberapa motivasi. Hal ini disebutkan oleh Scott dalam Indriani, Darmawan *et al.* (2014) mengenai faktor-faktor yang mendorong manajer melakukan tindakan manajemen laba, diantaranya:

a) Rencana bonus (*bonus scheme*)

Manajer pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan menggunakan laba akuntansi untuk menentukan besarnya bonus yang diterima. Manajer akan cenderung menghindari metode akuntansi yang dapat melaporkan laba lebih rendah. Sebaliknya, manajer cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat memaksimalkan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah bonus yang diterima.

b) Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*)

Kontrak hutang jangka panjang merupakan perjanjian yang dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur. Motivasi ini sejalan dengan *debt covenant hypothesis* yang mana manajer akan menggunakan metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Sehingga, perusahaan dapat terhindar dari pelanggaran kontrak hutang.

c) Motivasi politik (*political motivations*)

Perusahaan dan aspek politisnya merupakan dua hal yang berkaitan, terutama perusahaan besar dan strategis. Perusahaan tersebut akan memilih metode akuntansi yang menurunkan laba perusahaan pada periode kemakmuran yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, seperti subsidi.

d) Motivasi perpajakan (*taxation motivation*)

Perpajakan merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan meminimalkan laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar ke pemerintah.

e) Pergantian direksi

Saat akan terjadi pergantian direksi akibat masa pensiun atau berakhirnya kontrak direksi akan cenderung meningkatkan laba yang dilaporkan. Hal ini dilakukan agar bonus yang diterima juga meningkat. Begitu juga dengan direksi yang kinerjanya kurang baik akan

cenderung meningkatkan laba yang dilaporkan untuk menghindari diri dari pemecatan.

f) Penawaran saham perdana (IPO)

Pada awal penjualan saham ke publik, laba yang dicantumkan di dalam prospektus merupakan informasi penting yang akan dijadikan acuan bagi investor untuk menilai perusahaan dan untuk mengambil keputusan investasi. Untuk mempengaruhi keputusan tersebut maka manajer cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.

2.1.8.4 Teknik Manajemen Laba

Setiawati dan Na'im (2000) menyebutkan ada tiga teknik untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

a) Perubahan metode akuntansi

Manajemen laba dapat dilakukan dengan mengubah metode akuntansi yang digunakan sebelumnya untuk mencatat suatu transaksi. Contohnya, mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode *sum of the year* menjadi metode garis lurus atau dengan mengubah periode depresiasi, dan sebagainya.

b) Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi

Manajemen laba dapat dipengaruhi melalui perkiraan dari estimasi akuntansi. Sehingga, manajer memiliki kesempatan untuk menggunakan subjektivitasnya. Contohnya, kebijakan mengenai perkiraan piutang tak tertagih, kebijakan mengenai perkiraan waktu

depresiasi aktiva tetap atau amortisasi *intangible assets*, dan sebagainya.

c) Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser periode atau pendapatan. Teknik ini sering juga disebut manipulasi keputusan operasional. Contohnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi produk sampai ke periode selanjutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, menentukan waktu penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai, dan sebagainya.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan, mekanisme *corporate governance*, dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya penelitian yang dilakukan Jao dan Pagalung (2011) yang menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Objek dari penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2006 hingga 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Variabel kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif

signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan untuk variabel *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Kusumayani dan Sitinjak (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan ukuran KAP terhadap kualitas laba dengan variabel intervening berupa manajemen laba. Penelitian tersebut menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2006 hingga 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diuji dengan variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba tetapi berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Variabel kepemilikan manjerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba tetapi berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Sedangkan variabel ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) yang menguji hubungan *good corporate governance* dengan manajemen laba pada perusahaan perbankan. Perusahaan perbankan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Pengujian menggunakan variabel dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial variabel dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan

variabel komite audit independen dan kepemilikan manajerial yang tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dalam penelitian tersebut.

Penelitian lain untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh Pujiati dan Arfan (2013). Penelitian tersebut menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2006-2010 sebagai objek penelitian. Struktur kepemilikan yang diwakili oleh variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional menunjukkan hasil bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kompensasi bonus juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selain itu, secara simultan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen laba.

Azlina (2010) juga melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Penelitian tersebut menganalisis perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah dewan direksi, *leverage*, persentase saham yang ditawarkan ke publik, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi, *leverage*, dan persentase saham yang ditawarkan ke publik tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun, ukuran perusahaan yang diukur dengan rata-rata total aktiva dengan skala rasio berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba

Penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Azlina (2010) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba tetapi arah hubungannya tidak diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H_1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.3.2 Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011), kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kepemilikan manajerial akan menyelaraskan kepentingan pihak manajemen dengan pemegang saham sehingga mengurangi tindakan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumayani dan Sitinjak (2012) serta Pujiati dan Arfan (2013) menunjukkan hasil yang sama. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Maka, hipotesis penelitian ini adalah:

H_2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

2.3.3 Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba

Variabel kepemilikan institusional yang diuji oleh Kusumayani dan Sitinjak (2012) merumuskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Pujiati dan Arfan (2013) dalam penelitiannya. Kepemilikan yang besar oleh investor institusional dapat mencegah terjadinya tindakan manajemen laba. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.3.4 Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba

Secara teori semakin besar jumlah dewan komisaris, maka fungsi servis dan kontrol akan semakin baik. Dewan komisaris akan membatasi tindakan manajemen laba yang dapat menaikkan kualitas laba. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumayani dan Sitinjak (2012) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dengan demikian, tindakan manajemen laba akan meningkat jika ukuran dewan komisaris diperbesar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₄ : Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.3.5 Komite Audit dengan Manajemen Laba

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Semakin banyak jumlah pertemuan komite audit maka akan menurunkan tindakan manajemen laba. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamudji dan Trihartati (2010) bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

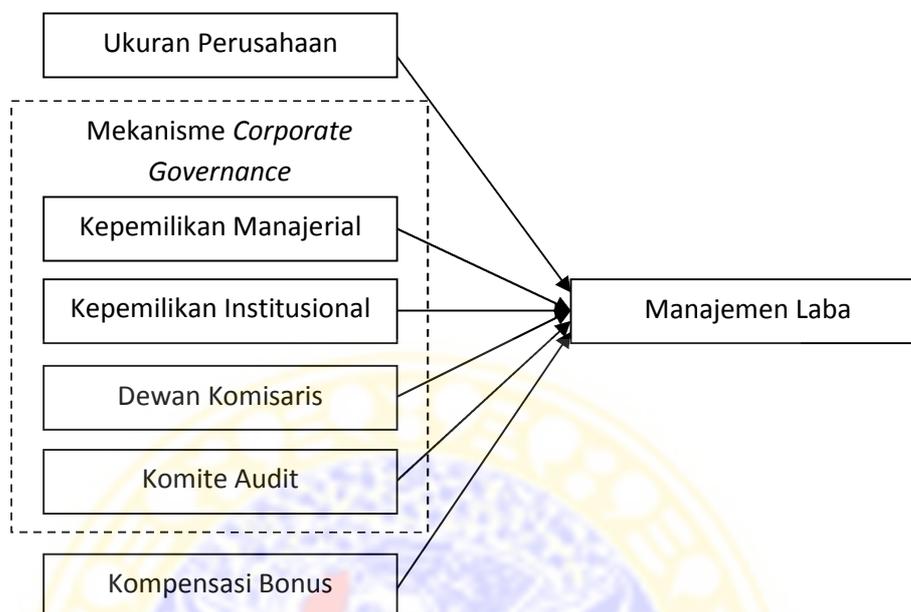
H₅ : Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.3.6 Kompensasi Bonus dengan Manajemen Laba

Pujiati dan Arfan (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kompensasi bonus berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. hal ini tidak konsisten dengan *bonus plan hypothesis*, dimana manajer cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan sehingga dapat memaksimalkan bonus yang akan diterima. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₆ : Kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.5 Model Analisis

Berdasarkan hipotesis dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, maka alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM-PLS)*. PLS pertama kali dikembangkan oleh Herman Wold. Wold (1985) dalam Ghozali (2011) menyatakan bahwa PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Data yang digunakan tidak harus berdistribusi *normal multivariate* dan jumlah sample tidak harus besar. Selain itu, PLS dapat menganalisis konstruk dengan indikator refleksif dan indikator formatif sekaligus. Ghozali (2011) menyebutkan bahwa model *path analysis*

(analisis jalur) semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan, yaitu *inner model*, *outer model*, dan *weight relation*.

Adapun model persamaan untuk analisis partial least square dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\eta = \gamma_1\xi_1 + \gamma_2\xi_2 + \gamma_3\xi_3 + \gamma_4\xi_4 + \gamma_5\xi_5 + \gamma_6\xi_6 + \zeta$$

Keterangan:

η : variabel dependen, yaitu manajemen laba

γ_{1-6} : koefisien pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

ξ_1 : variabel independen pertama, yaitu ukuran perusahaan

ξ_2 : variabel independen kedua, yaitu kepemilikan manajerial

ξ_3 : variabel independen ketiga, yaitu kepemilikan institusional

ξ_4 : variabel independen keempat, yaitu dewan komisaris

ξ_5 : variabel independen kelima, yaitu komite audit

ξ_6 : variabel independen keenam, yaitu kompensasi bonus

ζ : *residual variable*